



Banyak Warga Belum Tahu Ada Pengetatan

JOGJA-Sejumlah warga dan pelaku usaha mengaku tidak mengetahui adanya Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) di DIY.

► Pemda DIY masih akan mengambil tindakan persuasif kepada para pelanggar.

► Pemda DIY akan mendistribusikan 22.070 dosis vaksin ke Kota Jogja dan Sleman pada Rabu (13/1).

Lugas Subarkah, Sirgul Khafid, & Jumali
redaksi@harianjogja.com

Padahal, pengetatan yang bertujuan untuk menekan persebaran Covid-19 tersebut sudah berjalan sejak Senin (11/1). Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, menjelaskan pada pengawasan PTKM hari pertama, sebanyak 150 petugas yang dibagi dalam enam regu diturunkan untuk mengawasi. Regu pertama operasi masker pukul 08.00 WIB, regu dua operasi *work from office* (WFH) 25% di perkantoran dan tempat kerja, regu tiga operasi kapasitas 25% di tempat makan, serta regu lainnya operasi jam tutup 19.00 WIB. Dari operasi tersebut, ditemukan masih banyak perkantoran



dan tempat usaha yang belum mengetahui adanya PTKM pada 11-25 Januari.

"Waktu ditetapkannya Instruksi Gubernur sampai pelaksanaan cukup mepet, belum semua masyarakat tahu item apa yang diatur dalam PTKM," ujarnya, Selasa (12/1).

Sebab itu, hingga PTKM hari keempat, Pemda DIY masih akan mengambil tindakan persuasif kepada para pelanggar, sebelum diterapkannya mekanisme sanksi. Pada hari pertama, didapat enam perusahaan yang tidak menerapkan WFH sama sekali dan enam tempat makan yang tidak menerapkan kapasitas maksimal 25%.

► Halaman 10

Banyak Warga...

Untuk pembatasan jam tutup pukul 19.00 WIB di tempat usaha, wilayah Tugu, Malioboro, Titik Nol, dan Kraton, kata dia, sudah cukup terkendali. Namun untuk tempat usaha di luar wilayah itu masih banyak yang melanggar dengan tetap buka di atas pukul 19.00 WIB.

Ia menegaskan pada poin ini, tempat makan masih bisa buka di atas pukul 19.00 WIB tetapi hanya boleh melayani *take away* atau dibungkus.

"Pagi bisa layanan di tempat 25 persen sampai 19.00 WIB. Setelah itu diperkenankan buka sesuai jam operasional dengan catatan tidak mengizinkan makan ditempat. *Take away*," ungkapnya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Biwara Yuswantana, mengatakan Penda DIY merevisi poin WFFH, yang sebelumnya hanya 50% menjadi 75%.

"Setelah diskusi dan rapat, kami revisi itu agar sesuai dengan instruksi dari Pusat, supaya ada keseragaman karena kebijakan ini berlaku untuk Jawa dan Bali," katanya.

Kondisi yang sama terjadi di Kota Jogja.

Masih banyak pedagang, khususnya pedagang kecil, yang belum mengetahui apabila jam operasional maksimal pukul 19.00 WIB.

Kepala Satpol PP Kota Jogja Agus Winarto, mengatakan sudah banyak pelaku usaha yang tertib, khususnya usaha skala besar seperti mal, bioskop, dan lainnya. Namun untuk usaha kecil seperti warung tenda, lesehan, warnindo, dan angkringan masih banyak yang melayani makan di tempat melewati pukul 19.00 WIB.

Saat patroli, Agus juga mendapat pertanyaan terkait dengan sistem *take away* untuk tempat makan. Pada dasarnya, sistem *take away* diperbolehkan dan bisa beroperasi melebihi pukul 19.00 WIB. Namun ada beberapa syarat seperti tidak menyediakan kursi dan meja bagi pengunjung, menutup sebagian pintu, dan memasang keterangan.

Agus juga menemukan angkringan yang buka di tengah kampung. Dia tidak menutup dan menyerahkan itu pada kearifan lokal. Hal itu lantaran konsumen angkringan hanya beberapa rumah di wilayah tersebut. "Tapi tidak [menerima

konsumen] dari luar [kampung], *mangga* kalau gitu," kata Agus.

Bagi para pelanggan yang masih kooperatif, hukuman masih berupa teguran. Namun apabila pelanggan tidak kooperatif dan cenderung membahayakan, Satpol PP Kota Jogja akan menutup paksa tempat tersebut. Tidak ada hukuman denda bagi pelanggan.

Adapun, Satpol PP Bantul bersama dengan tim gabungan telah mengeluarkan teguran untuk 14 tempat usaha. Mereka ditegur karena belum menerapkan protokol kesehatan dan melanggar jam operasional.

Kasi Linmas Satpol PP Bantul, Rujito mengatakan keempat belas usaha yang ditegur tersebut berasal dari

Kaparewon Bantul dan Kaparewon Imogiri. "Kami sengaja memberikan edukasi di tiga hari awal penerapan pembatasan. Jika nanti masih tetap dilanggar maka akan kami tutup," katanya.

Salah satu pengelola toko swalayan di Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Saliman mengaku mendukung langkah dari Pemkab Bantul yang memberlakukan PTKM. Karena tujuan dari pembatasan adalah untuk menekan laju perkembangan Covid-19 di Bumi Proklamasi.

"Saya tidak masalah jika pendapatan mengalami penurunan. Karena harus tutup lebih awal. Tujuannya kan untuk mencegah perkembangan Covid-19," ungkapnya.

Di Kabupaten Sleman, Plt Kepala Satpol PP, Susmiarto mengatakan sebagian besar toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan rumah makan sudah tutup sesuai dengan Instruksi Bupati Sleman. "Kerumunannya otomatis berkurang. Akhirnya, secara keseluruhan potensi kerumunan berkurang. Walaupun, masih ada satu dua yang ada kerumunan," ujar Susmiarto.

Susmiarto mengatakan pihaknya bakal melakukan tindakan tegas dengan membubarkan kerumunan saat penerapan PPKM di Bumi Sembada. Pelaku usaha yang melanggar protokol pencegahan penularan Covid-19 juga bakal dilakukan peringatan.

Program Vaksinasi

Sementara itu, menindaklanjuti proses vaksinasi Covid-19, Penda DIY akan mendistribusikan 22.070

dosis vaksin ke Kota Jogja dan Sleman pada Rabu (13/1). Distribusi untuk tiga kabupaten lainnya masih menunggu arahan Kementerian Kesehatan.

Juru Bicara Penda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih, menjelaskan dari 26.800 dosis vaksin yang telah berada di gudang farmasi Dinas Kesehatan DIY, 9.728 dosis akan didistribusikan ke Kota Jogja dan 12.342 dosis ke Sleman.

"Distribusi ke Kota Jogja dan Sleman akan dilaksanakan pada 13 Januari. Sedangkan untuk kabupaten yang lain akan didistribusikan setelah mendapat *dropping* tahap satu termin dua dari Biofarma," katanya.

Seperti vaksin program imunisasi lainnya, distribusi akan dilakukan Dinas Kesehatan DIY ke gudang farmasi Kota Jogja dan Sleman. Adapun 4.730 dosis vaksin sisa dari tahap satu termin satu masih disimpan sembari menunggu tambahan dan arahan berikutnya dari kementerian.

Dalam kesempatan itu, Berty mengumumkan 268 penambahan kasus positif Covid-19 pada Selasa, berdasarkan pemeriksaan 1.046 sampel dari 1.012 orang. Kabupaten Bantul mendominasi penambahan kasus sebanyak (117 kasus), disusul dari Sleman (54 kasus), Kota Jogja (35 kasus), Gunungkidul (34 kasus), dan Kulonprogo (28 kasus).

Sebanyak 150 kasus dinyatakan sembuh dan tiga kasus dilaporkan sembuh. Berty Murtiningsih, menjelaskan dilihat dari riwayatnya, penambahan kasus terdiri dari *tracing* kasus positif (143 kasus), periksa mandiri (73 kasus), *screening* karyawan kesehatan (1 kasus), perjalanan luar daerah (2 kasus), dan belum ada keterangan (49 kasus).

Menurut Berty, kasus sembuh berdasarkan domisili meliputi Kota Jogja (1 kasus), Bantul (43 kasus), Kulonprogo (43 kasus), Gunungkidul (29 kasus), dan Sleman (34 kasus).

Dengan penambahan ini, total kasus positif DIY menjadi sebanyak 15.482 kasus, dengan rincian 4.905 kasus aktif, 10.241 kasus sembuh, dan 336 kasus meninggal. Sementara penggunaan bed di rumah sakit rujukan untuk kritikal 53 bed, sisa 23 bed. Untuk nonkritikal 622 bed, sisa 30 bed.

(Hafid Yudi Suproba)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			
4. Dinas Perdagangan			

Yogyakarta, 28 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005